

**PERJANJIAN KINERJA
KETUA MAHKAMAH PELAYARAN
TAHUN 2026**



**MAHKAMAH PELAYARAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
UNIT KERJA MAHKAMAH PELAYARAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Capt. Sahattua P. Simatupang, MM.,MH.,CGCAE
Jabatan : Ketua Mahkamah Pelayaran

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc



Capt. Sahattua P. Simatupang, MM.,MH.,CGCAE



Kegiatan	Anggaran
1. Legislasi dan Litigasi	Rp. 120.000.000;
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp. 2.689.655.000;
3. Penegakan Hukum Keselamatan Pelayaran	Rp. 1.740.000.000;
4. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp. 275.000.000;
5. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum	Rp. 19.337.101.000;
Total	Rp 24.161.756.000;

Disetujui,
Sekretaris Jenderal

Jakarta, Desember 2025

Ketua Mahkamah Pelayaran

Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc



Capt. Sahattua P. Simatupang, MM., MH., CGCAE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
UNIT KERJA MAHKAMAH PELAYARAN

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SK 1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Keselamatan Transportasi	IKK 1.1	Tindak Lanjut Rekomendasi Keputusan Mahkamah Pelayaran	%	87
		IKK 1.2	Penyelesaian Perkara yang diputus Tepat Waktu terhadap Pemeriksaan Lanjutan Pelanggaran Pelayaran, kecelakaan kapal dan mediasi sengketa Perjanjian Kerja Laut	%	100
		IKK 1.3	Penyusunan Regulasi Bidang Transportasi berbasis Pelayaran, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen) , Peraturan Ketua Mahkamah Pelayaran	Dokumen	1
SK 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkungan Mahkamah Pelayaran.	IKK 2.1	Pengelolaan Organisasi dan SDM Mahkamah Pelayaran.	%	100
		IKK 2.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Mahkamah Pelayaran	%	100
		IKK 2.3	Nilai AKIP Mahkamah Pelayaran.	%	100

		IKK 2.4	Nilai Pengawasan Kearsiapan internal Mahkamah Pelayaran	%	100
		IKK 2.5	Terselenggaranya Layanan Perkantoran Mahkamah Pelayaran	%	100
		IKK 2.6	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Mahkamah Pelayaran	%	100